

## **Analisis Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi**

**Elsa Monika<sup>1\*</sup>, Rachmad<sup>1</sup>, Erni Achmad<sup>1</sup>, Ray Octa Firdaus<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

<sup>2</sup> Politeknik Negeri Batam, Batam, Indonesia

### **Abstrak**

Pemerintah Indonesia menggunakan sistem otonomi daerah, yang mengharuskan pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengatur keuangan mereka sendiri. Sistem ini sebenarnya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan negara. Belanja modal memengaruhi pertumbuhan ekonomi di beberapa penelitian. Namun, pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah Indonesia beraneka macam termasuk di kabupaten/kota wilayah jambi. Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut belum sangat unik karena berfluktuasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten atau kota di Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana. Hasil menunjukkan nilai R-squared di bawah t tabel sebesar 0.271366, hasil penelitian memperlihatkan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten atau kota di provinsi Jambi.

**Kata Kunci:** Pertumbuhan Ekonomi, Provinsi Jambi, Belanja Modal

### **Histori Artikel**

Diterima 13 Desember 2025, Direvisi 3 Januari 2026, Disetujui 6 Januari 2026, Dipublikasi 14 Januari 2026.

### **\*Penulis Koresponden:**

Rayocta2610@gmail.com

### **DOI:**

<https://doi.org/10.60036/phjhxt33>

## PENDAHULUAN

Otonomi daerah di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 2001. Dengan menerapkan otonomi daerah, otomatis pemerintah daerah harus memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengatur keuangan mereka sendiri. Hal ini dibuat berdasarkan kebutuhan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan masing-masing daerah.

Selain itu, otonomi daerah seharusnya bermanfaat bagi masyarakat dengan menyediakan pelayanan umum yang utuh, termasuk asas desentralisasi. Didalam Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, wewenang hak serta kewajiban daerah otonom untuk mengelola dan mengawasi sendiri kepentingan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal adalah definisi otonomi daerah.

Otonomi daerah dimaksudkan untuk terjadi percepatan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antara daerah serta menaikkan kepuasan pelayanan publik untuk menjadi lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan karakteristik daerah masing-masing. Otonomi daerah memiliki efek yang beragam pada ekonomi lokal, dan itu juga bisa menyebabkan risiko fiskal terjadi di negara Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses perkembangan, kemajuan, kesejahteraan, dan perubahan fundamental dalam kesejahteraan sebuah negara yang dilihat dari meningkatnya konsumsi dan produktivitas warganya. Beberapa faktor yang dianggap sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara antara lain kekayaan dan tanah, tenaga kerja dan kualitas penduduk, barang modal dan teknologi, sistem sosial dan masyarakat, dan peningkatan pendapatan nasional dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun.

Pembangunan ekonomi suatu negara adalah suatu metode mengetahui Pembangunan suatu negara. Jadi, pemerintah di tingkat pusat dan daerah berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan ekonomi. Menurut Boediono (1999), peningkatan hasil perkapita dalam jangka waktu yang lama dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, mengukur pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan konsumsi barang dan jasa serta peningkatan kemampuan daya beli masyarakat.

Setiap daerah di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang unik, karena setiap daerah mempunyai jumlah penduduk, kemampuan, dan pengembangan potensi yang berbeda. Salah satu wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang menarik adalah Provinsi Jambi, provinsi ini terletak di Sumatera, Jambi adalah salah satu wilayah yang membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Provinsi Jambi terdiri dari sebelas kabupaten dan kota. Setiap daerah di Provinsi Jambi memperhatikan pertumbuhannya. Karena pertumbuhan ekonomi adalah salah satu faktor yang menentukan kesejahteraan kaum miskin. Pemerintah daerah Jambi, atau kabupaten/kota, terus berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui kemajuan ekonomi. Membangun sarana dan prasarana yang dibelanjai daerah melalui belanja modal adalah salah satu upaya yang dilakukan. Tingkat pertumbuhan ekonomi Jambi adalah salah satu provinsi yang paling cepat berkembang. Badan Pusat Statisti (BPS) Provinsi Jambi (2023).

Laju pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jambi sangat berbeda dari tahun 2018 hingga 2022, rata-rata kenaikan pertumbuhan sebesar 3,72%. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi tidak terlepas dari upaya pemerintah kabupaten dan kota provinsi untuk meningkatkan realisasi belanja modal. Menurut Supralyitno (2015), pertumbuhan ekonomi berdampak positif pada pengelolaan modal pemerintah. Dengan demikian, Adi (2006) menyatakan bahwa belanja pembangunan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik dapat meningkatkan layanan masyarakat dan menarik investor. Menurut Rahmawati (2022), dengan anggaran yang besar, pemerintah setiap daerah akan mudah mengatur perputaran keuangan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, termasuk

pemerintah provinsi Jambi, pemerintah intensif membangun daerah dan memantu masyarakatnya sejahtera jika dan belanja modal dinaikkan. Tidak ada penelitian yang secara khusus mempelajari pengaruh belanja modal pada pertumbuhan ekonomi pada. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh belanja modal terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di provinsi Jambi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten atau kota di provinsi Jambi.

## KAJIAN TEORI

### Belanja Modal

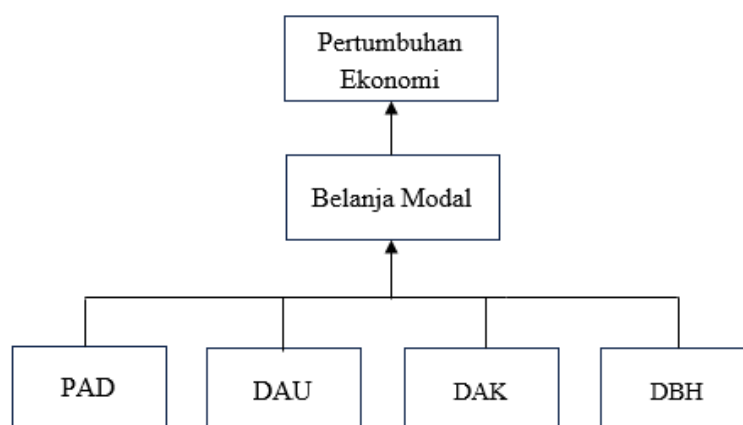
Furqani dan Titimmah (2015) menyatakan bahwa belanja modal adalah kegiatan menggunakan anggaran dari APBN/APBD dengan membeli aset tetap dan aset tidak tetap, tujuannya supaya berguna lebih banyak selama periode yang ditentukan. Dana belanja modal untuk setiap kabupaten atau kota diatur melalui pelaksanaan rapat APBD. Pemangku kebijakan mengatur belanja modal untuk tujuan tertentu (Nordawati, 2006). Beberapa faktor, seperti pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi umum (DAU), dan dana bagi hasil (DBH), memengaruhi belanja modal suatu daerah.

### Pertumbuhan ekonomi

Menurut Jhingan (2004), perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi. Dimana perubahan spontan dan tidak konstan dalam waktu tertentu, mengganti situasi keseimbangan dari sebelumnya adalah definisi perkembangan ekonomi. Namun, perubahan spontan dan dalam periode tertentu, merubah dan mengganti situasi kesejahteraan melalui kenaikan tabungan dan pendapatan masyarakat adalah definisi pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi diukur dari tahun 1969 hingga 1981, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7,7% per tahun. Sebesar 4% per tahun sejak tahun 1982 ekonomi Indonesia mengalami penurunan (Yuliadi, 2009).

### Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi

Belanja modal memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Menimbang bahwa membuat infrastruktur penunjang perekonomian dari alokasi BM, akan membantu kenaikan produktifitas pada masyarakat. Pada waktunya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat pada pendapatan per kapita. Namun dari beberapa penelitian sebelumnya seperti pendapat Anasmen (2009), belanja modal pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi mendapatkan hasil tidaklah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data sekunder, untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan pengumpulan data melalui studi pustaka dari laporan yang dipublikasikan serta referensi lainnya yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari DJPK Kemenkeu. Selain itu data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui akses internet pada Alamat website resmi antara lain [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), dan situs resmi pemerintah daerah provinsi jambi.

Analisis data menggunakan fixed effect modal untuk melihat pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan uji t untuk mengukur variable bebas berupa belanja modal seberapa berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi jambi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Provinsi jambi rata-rata diberikan dana belanja modal Rp 400.000.00 Dana belanja modal tersebut daridana alokasi umum dan khusus, dana tersebut untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi sehingga perputaran uang diwilayah ini lebih merata pada masyarakatnya. Namun sejak 2018 sampai 2023 rata-rata pertumbuhannya hanya mencapai 3,72%, dibawah target nasional yang menginginkan 5%.

Lalu apakah selama ini belanja modal sudah digunakan tepat saran untuk meningkatnya kesejahteraan Masyarakat diprovinsi jambi. Interpretasi Hasil Fixed Effect Model (FEM) adalah salah satu metode yang dipakai pada penelitian ini untuk mengetahui belanja modal apakah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota provinsi jambi.

**Tabel 1.** Model Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.848286	1.021416	2.788567	0.0069
BM	4.46E-09	3.97E-09	1.123406	0.2654
<b>Fixed Effects (Cross)</b>				
KRC		0.880983		
MRG		0.689392		
SRL		0.713251		
BTH		1.411288		
MJ		0.225811		
TJT C		-2.627173		
TJB C		-0.985251		
TB C		0.503051		
BNG C		0.399952		
KJ C		-1.628650		
KSP C		0.417346		
<b>Effects Specification</b>				
<b>Cross-section fixed (dummy variables)</b>				
Durbin-Watson stat	2.202162	Root MSE		2.217205
Adjusted R-squared	0.231136	Mean dependent var		3.953377
S.E. of regression	2.413207	S.D. dependent var		2.451676
Sum squared resid	378.5318	R-squared		0.271366
Schwarz criterion	5.107328	Log likelihood		-170.5693
Hannan-Quinn criter.	4.888164	F-statistic		1.222034
Durbin-Watson stat	2.202162	Prob(F-statistic)		0.290852

Sumber: Diolah menggunakan Eviews 12

Berdasarkan hasil estimasi perhitungan diatas, dapat dilihat jika terjadi perubahan antara variabel belanja modal baik antar variabel maupun antar waktu, nilai konstanta adalah 2.84, itu artinya bahwa pertumbuhan ekonomi akan meningkat 2,84 % jika belanja modal tetap. Nilai koefisien belanja modal sebesar 4,46, dimana itu berarti pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 4,46% jika belanja modal meningkat satu juta rupiah. Berdasarkan hal tersebut belanja modal berpotensi mendukung naiknya ekonomi diprovinsi jambi jikda bisa dialokasikan tepat sasaran.

### Hasil Uji Statistik

#### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Setelah mengetahui konstanta belanja modal bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, metode analisa Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk suatu melihat seberapa jauh kemampuan model untuk menerapkan variasi variable dependen (terikat satu sama lain). Antara nol dan 1 menjadi Nilai kisaran  $R^2$ . Jika ternyata nilai  $R^2$  rendah artinya menunjukkan kemampuan variable-variable bebas harus tetap menjadi variable-variable terikat, seperti yang tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 2.** Koefisien Determinasi  
Effects Specification

R-squared	0.271366
Adjusted R-squared	0.231136
S.E. of regression	2.413207
Sum squared resid	378.5318
Log likelihood	-170.5693

Sumber: Diolah menggunakan Eviews 12

Dari tabel nilai koefisien determinasi, R-squared adalah sebesar 0.27. Artinya sebesar 27.13 % pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Jambi periode 2017 – 2023 terikat oleh variabel belanja modal, pertumbuhan ekonomi tersebut di tenggarai oleh kegiatan penambahan modal di kas APD Provinsi Jambi. Sedangkan sisanya 72.87 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang bisa diteliti diluar penelitian ini. faktor-faktor lain itu bisa terkait dengan peningkatan lapangan kerja ataupun bantuan-bantuan untuk kemajuan UMKM daerah. Karena hanya sekitar seperempat belanja modal berpengaruh sedangkan selebihnya dipengaruhi variable lain, maka dari hasil itu dapat dinyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak lah berpengaruh dari belanja modal di provinsi jambi.

### Uji t Statistik

Uji t merupakan metode pamungkas pada penelitian ini untuk memastikan pertumbuhan ekonomi apakah dipengaruhi belanja modal di wilayah jambi atau tidak. Metode ini menjadi uji selanjutnya dimana variable terikat (pertumbuhan ekonomi) secara signifikan tidak dipengaruhi oleh variable bebas (belanja modal. Langkah pertama dengan melihat nilai probability t-statistic pada setiap variabel bebas, dalam menentukan nilai t tabel dengan rumus  $N-n$  atau  $77-1 = 76$ , maka dengan tingkat signifikansi 90 persen atau alfa 0,10 persen diketahui nilai t tabel sebesar 1.66515, maka uji t statistik dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.** Nilai t Statistik Pada Model FEM

Variabel	t Statistik	t Tabel	Prob (t-statistic) (p-value)	Tingkat Signifikansi ( $\alpha$ )	Keterangan
BM	1.123406	1.66515	0.2654	0.10	Tidak Signifikan

Sumber: Diolah menggunakan Eviews 12

Dari tabel diatas dapat dilihat Variabel belanja modal memiliki nilai Prob t-statistic sebesar  $0.2654 > 0.10$  atau dapat dilihat dari nilai t statistik  $> t$  tabel yaitu sebesar  $1.12 < 1.66$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  di tolak. Ini berarti variabel belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Sehingga dari hasil uji t sejalan dan mendukung terhadap uji koefisien yang dilakukan sebelumnya. Banyak faktor lain yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi diwilayah jambi untuk periode 2018-2023. Belanja modal tidak berpengaruh signifikan karena dalam periode tersebut tidak di manfaatkan dengan baik. Banyak alokasi belanja modal tidak tepat sasaran, seperti menggunakan dana belanja modal untuk memperbaiki rumah dinas dan mobil dinas pejabat daerah.

## Pembahasan

Hasil dari beberapa rangkaian metode analisis diatas memperlihatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten atau kota di provinsi Jambi tidak dipengaruhi oleh belanja modal. Penemuan ini sama dengan penelitian Fajri (2016), yang menemukan bahwa belanja modal tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Sumatera dari tahun 2009 hingga 2013.

Selain itu, fakta bahwa pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di setiap Kabupaten atau Kota di Provinsi Jambi tidak signifikan menunjukkan bahwa belanja modal tersebut dialokasikan dengan tidak tepat, dana belanja modal harusnya bisa mendukung visi dari Provinsi Jambi yang ingin mensejahterakan rakyatnya dan memajukan setiap kabupaten/kota di wilayah jambi. Banyak potensi diprovinsi jambi yang bisa membantu terwujudnya visi tersebut, seperti potensi sumberdaya alam berupa Batubara. Dana belanja modal bisa dimanfaatkan untuk membangun jalan khusus untuk distribusi hasil batu bara tersbut sehingga tidak menggunakan jalan provinsi maupun jalan negara lagi yang selama ini banyak menimbulkan masalah dan keterlambatan distribusinya.

dana belanja modal yang dijalankan beberapa tahun ini harus dikelola dengan lebih bijak seperti alokasi terhadap fasilitas pejabat (pembelian mobil dinas) dapat dihilangkan. Pengelolaan penggunaan belanja modal yang dianggarkan untuk membeli barang dan jasa pemerintah daerah tidak bisa meningkatkan laju produksi barang dan perekonomian Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Peningkatan belanja modal yang berasal dari pendapatan asli daerah dan pengalokasian dana alokasi umum. Pendapatan asli daerah yang optimal dapat meningkatkan ketergantungan daerah terhadap transfer dari pusat, yang dapat membantu pemerintah daerah. Namun kesalahan alokasi belanja modal harus diselesaikan dulu, karena akan sia-sia jika anggaran belanja modal ditambah namun tidak digunakan untuk kesejahteraan masyarakat diwilayah jambi

Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi harus melakukan hal-hal berikut untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan pengalokasian dana alokasi umum:

1. Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada kota dan kabupaten harus dihitung kembali untuk menentukan target pendapatan yang ingin dicapai kedepan. Selain itu, pemerintah perlu evaluasi penerimaan pendapatan di lembaga yang mengelola sumber pendapatan daerah untuk menentukan langkah-langkah mengoptimalkan pendapatan asli daerah pada tahun berikutnya.
2. Karena dana alokasi umum sangat memengaruhi belanja modal, pemerintah daerah harus meningkatkan anggaran dana alokasi umum yang dialokasikan ke anggaran belanja modal untuk membiayai pengeluaran pemerintah, terutama untuk meningkatkan pelayanan publik.
3. Belanja modal yang tidak perlu seperti anggaran mobil dinas dan rumah dinas dapat dikurangi secara signifikan.
4. Dana belanja modal bisa mendukung terwujudnya visi provinsi jambi untuk memajukan wilayahnya dengan mengalokasikannya untuk membuat fasilitas berupa jalan khusus untuk

mendistribusikan sumber daya alamnya seperti Batubara. Menurut BPS Jambi (2023), hasil pertambangannya menjadi pemasukkan tertinggi di Provinsi Jambi

## SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi tidak dipengaruhi oleh variabel belanja modal dengan nilai R-squared 0,27. Berdasarkan uji T belanja modal tidak berpengaruh nyata terhadap laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi jambi. Pemerintah provinsi jambi harus lebih bijak mengelola distribusi belanja modal supaya kedepan belanja modal bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi jambi

## Saran

Diharapkan pemangku kebijakan terutama yang berhubungan dengan alokasi belanja modal di Provinsi Jambi bisa lebih bijak. Penelitian selanjutnya bisa diarahkan pada Analisa pengaruh faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan di wilayah-wilayah provinsi jambi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Harry dan Harianto David, 2007. *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Perkapita*. Makasar: Simposium Nasional Akuntansi X.
- Anasmen. 2009. *Pengaruh Beanja Modal Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat 2000-2006*. Depok: Tesis S-2, Universitas Indonesia Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi Tahun 2022
- Boediono, 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE
- Fajri, A. (2016). *Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Sumatera*. In *Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah* (Vol. 5, Issue 1).
- Furqani, A & Titimmah. 2015. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pengaokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemkab Sumenep (Periode 2009-2013)*. *Jurnal Performance Bisnis & Akuntansi* Volume V, No. 2, September 2015.
- Jhingan, M.L., 2003, *Ekonomi Pembangunan dan Perekonomian*, Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada.
- Nordiawan, Deddi, 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salmba Empat.
- Rahmawati, H., 2022. Analisis Fungsi Pengeluaran Pemerintah terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur. *Jurnal STEI Ekonomi* 31, 77–82.
- Suprayitno Bambang. 2015. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Puaau Jawa*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP* Vol. 2, No. 1, Juni 2015: ISSN 2339 – 1545.